

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Pemerintah, dan Jumlah Penduduk terhadap Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Timur

Ashabul Hikam, Debby Nindya Istiandari

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Corresponden Email: ashabulhikam069@gmail.com

Abstract

The decline in Regional Original Revenue (PAD) across Indonesia, including in East Java Province, due to the COVID-19 pandemic has become a significant issue driving efforts toward revenue enhancement. As the province with the third-largest PAD after West Java, East Java faces this challenge by focusing on key economic factors. This study aims to analyze the influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), government expenditure, and population size on PAD in East Java from 2018 to 2022, utilizing a descriptive quantitative approach and panel data regression analysis. The results indicate that partially, GRDP and population size have a significant positive effect on PAD, whereas government expenditure has a significant negative effect. Simultaneously, all independent variables significantly affect PAD, with a coefficient of determination of 47.7%. These findings underscore the importance of local asset optimization and strategic policies in enhancing PAD in East Jawa.

Key Words: *Gross Regional Domestic Product, Government Expenditure, Population, Local Revenue*

Abstrak

Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur, akibat pandemi COVID-19 menjadi isu signifikan yang mendorong upaya peningkatan PAD. Jawa Timur, sebagai provinsi dengan PAD terbesar ketiga setelah Jawa Barat, menghadapi tantangan tersebut dengan fokus pada faktor-faktor ekonomi utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap PAD di Jawa Timur pada 2018–2022 menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan. Secara simultan, semua variabel independen memengaruhi PAD secara signifikan dengan koefisien determinasi 47,7%. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi aset daerah dan kebijakan strategis dalam meningkatkan PAD di Jawa Timur.

Kata Kunci: *Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah*

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan upaya strategis yang melibatkan peran pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat lokal, pembangunan ekonomi daerah melibatkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Pembangunan ini menjadi tolak ukur keberhasilan nasional yang membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola hak dan kewajibannya untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat (Hastuti, Kadarisman, 2017).

Sebagai bagian dari strategi pembangunan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi kebijakan penting untuk meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan demokratis. Meskipun terdapat tantangan multidimensi dalam pelaksanaannya, kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya yang beragam di 38 provinsi, pemerintah terus menyusun kebijakan strategis untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan (Saldi et al., 2021; Wahyuni, 2021).

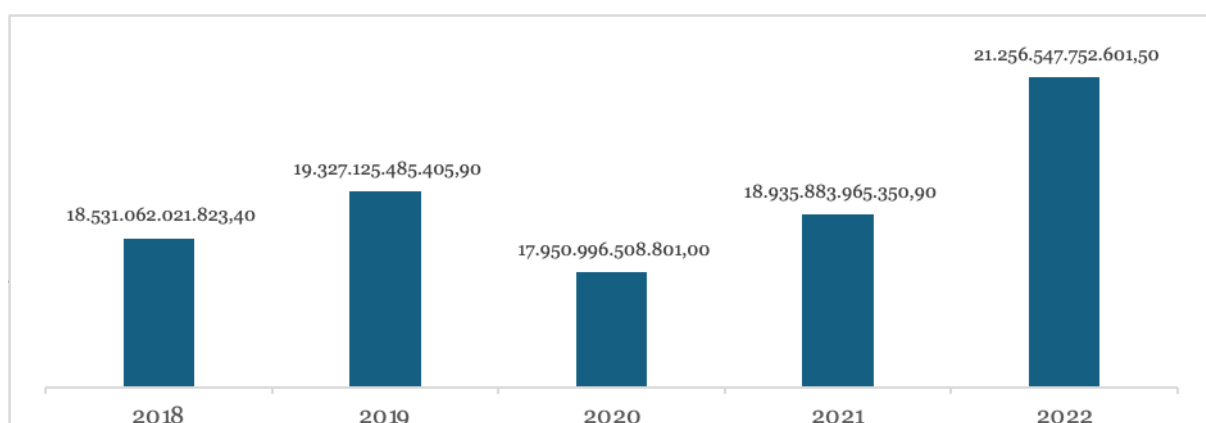
Di Indonesia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami tren peningkatan signifikan dari tahun 2018 hingga 2019, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan PAD tertinggi mencapai Rp55,66 triliun, diikuti Jawa Barat sebesar Rp21,36 triliun, dan Jawa Timur dengan Rp21,25 triliun. Sementara itu, provinsi di luar Jawa seperti Sulawesi Barat berada pada peringkat terendah dengan PAD Rp401,92 miliar, menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah.

Desentralisasi fiskal memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola PAD secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, bertujuan untuk memobilisasi sumber daya daerah guna mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan (Oktiani, 2021; Ernita, 2021). Namun, minimnya perolehan PAD sering kali menjadi hambatan dalam meningkatkan pelayanan publik dan fasilitas masyarakat, yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan potensi daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih peka dalam memaksimalkan aset dan sumber daya untuk mengoptimalkan PAD. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, daerah memiliki kewenangan untuk mengontrol sistem keuangannya guna memelihara infrastruktur publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara efektif dan efisien (Firdausy, 2017).

Provinsi Jawa Timur, sebagai wilayah dengan PAD tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat, mencakup 39 kota/kabupaten dengan Ibu Kota Surabaya. Aksesibilitas antardaerah yang baik serta beragam sumber daya potensial menjadi kekuatan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD.

Pada periode 2018-2022, PAD Jawa Timur mengalami fluktuasi signifikan. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, dari Rp19,33 triliun



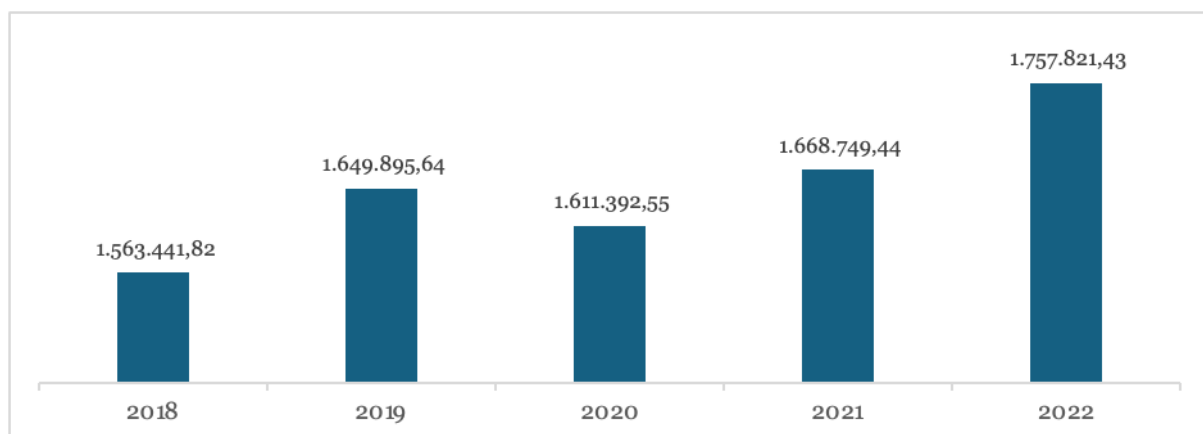
pada 2019 menjadi Rp17,95 triliun. Namun, pemulihan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya berhasil meningkatkan PAD hingga mencapai Rp21,25 triliun pada 2022, menunjukkan kemampuan Jawa Timur dalam bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, 2024

Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2018-2022

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur selama periode 2018-2022 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, PAD turun drastis dari Rp19,33 triliun pada 2019 menjadi Rp17,95 triliun akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, upaya pemulihan ekonomi berhasil meningkatkan PAD menjadi Rp18,93 triliun pada 2021 dan mencapai Rp21,25 triliun pada 2022, menandakan kebangkitan ekonomi Jawa Timur dari dampak pandemi.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat dilihat melalui indikator makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan nilai tambah dari berbagai sektor ekonomi di provinsi tersebut. PDRB berfungsi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi tahunan dan menunjukkan arah ekonomi regional. PDRB juga menjadi strategi untuk meningkatkan perekonomian daerah serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada.

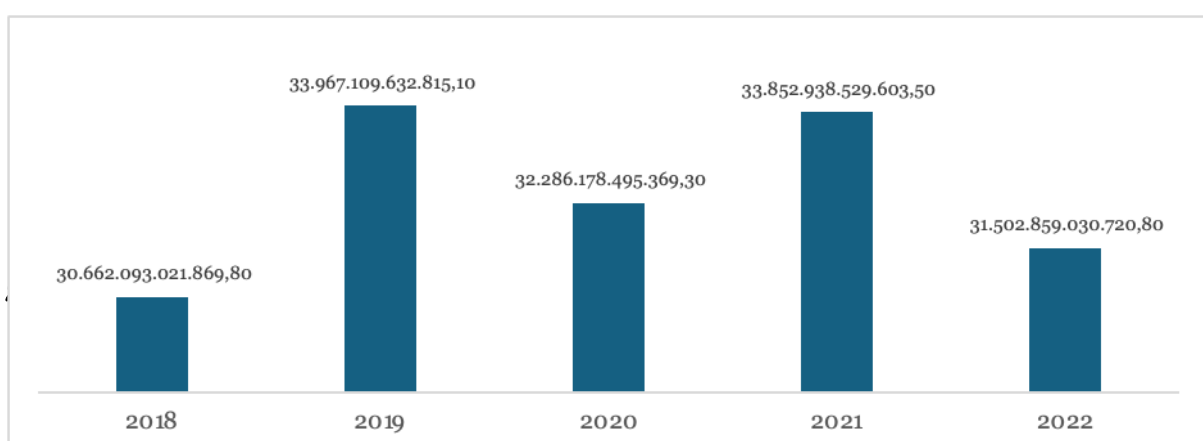


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Gambar 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

Pada Gambar 2, terlihat perkembangan PDRB atas harga konstan dari 2018 hingga 2022. Pada 2018, PDRB masih rendah, namun meningkat pada 2019 menjadi 1.649.895,64. Pada 2020, PDRB turun sekitar 30 juta menjadi 1.611.392,55. Di 2021, PDRB kembali meningkat signifikan, melampaui angka 2019 dengan 1.668.749,44, dan terus naik pada 2022 menjadi 1.757.821,43, menunjukkan tren peningkatan PDRB dari 2020 hingga 2022.

Selain PDRB, pengeluaran pemerintah juga merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan pembangunan. Pengeluaran pemerintah adalah jumlah yang



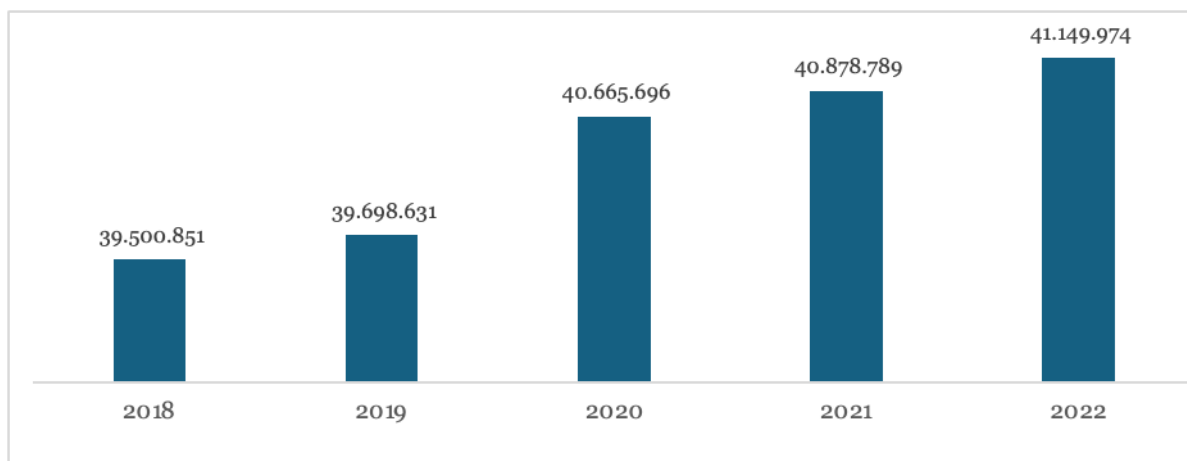
dibelanjakan untuk proyek-proyek sosial oleh pemerintah daerah. Berikut adalah data pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Gambar 3. Data Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

Pada Gambar 3, terlihat data pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022. Pengeluaran pada 2018 dan 2022 hampir sama, menunjukkan penurunan. Di 2020, pengeluaran meningkat sedikit menjadi 32.286.178.495.369,30. Sementara itu, pengeluaran 2019 dan 2021 mengalami lonjakan signifikan, masing-masing mencapai 33.967.109.632.815,10 dan 33.852.938.529.603,50, mencerminkan fluktuasi pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun.

Populasi suatu negara merupakan indikator penting dalam ekonomi klasik, sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, yang melihat populasi sebagai input potensial untuk meningkatkan output produksi. Semakin banyak pekerjaan tersedia, jumlah penduduk cenderung meningkat, sehingga diperlukan upaya untuk mengelola pertumbuhan populasi (Perwira et al., 2018). Adapun kondisi populasi di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Gambar 4. Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, jumlah penduduk mencapai 30.500.851 jiwa, naik menjadi 39.698.631 pada 2019, dan melonjak drastis pada 2020 menjadi 40.665.696 jiwa. Angka ini terus bertambah hingga 41.149.974 jiwa pada 2022. Peningkatan ini dipengaruhi oleh keberadaan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan Kota Surabaya sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar karena merupakan ibu kota provinsi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hernawati dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Bone, sementara pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian lain oleh Saldi et al. menunjukkan bahwa PDRB dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan uraian di atas, PAD di beberapa daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang stabil dengan fluktuasi pada periode tertentu, seiring bertambahnya jumlah penduduk yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi PAD. Penelitian ini menggunakan variabel PDRB, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk untuk menganalisis pengaruhnya terhadap PAD.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap PAD Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022. Kerangka pikir didasarkan pada teori desentralisasi fiskal dan pembangunan ekonomi daerah, dengan variabel independen (PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk) serta variabel dependen (PAD).

Data sekunder diperoleh dari BPS, BPKAD, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berupa data panel gabungan *cross-section* dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur dan *time-series* selama lima tahun. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan melalui uji Chow dan uji Hausman untuk memilih model terbaik. Selain uji pemilihan model, Peneliti juga melakukan uji asumsi klasik serta uji statistik yang meliputi uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap PAD, dengan pengolahan data menggunakan E-Views. Adapun persamaan model regresi data sebagai berikut:

$$\text{LogPADit} = \beta_0 + b_1 \log\text{PDRBit} + b_2 \log\text{PPit} + b_3 \log\text{JPit} + \varepsilon$$

Di mana PAD adalah pendapatan asli daerah, β_0 konstanta, β_1 sampai β_3 koefisien variabel independen, PDRB adalah produk domestik regional bruto, PP adalah pengeluaran pemerintah, JP adalah jumlah penduduk, dan ε adalah *error*. Model ini mengukur pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk terhadap PAD.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Pemilihan Model

Dalam analisis regresi data panel, pemilihan model terbaik dilakukan melalui tiga pendekatan utama: *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Pemilihan model dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman. Berikut hasil Uji Chow:

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.340520	(37,149)	0,0002
Cross-section Chi-Square	87.055329	37	0,0000

Sumber : Hasil olah data E-Views, 2024

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model yang digunakan adalah *CEM* atau *FEM*. Berdasarkan kriteria keputusan, jika nilai probabilitas $> 0,05$, digunakan *CEM*, sedangkan jika $< 0,05$, digunakan *FEM*. Hasil olahan data menggunakan Eviews 10 menunjukkan nilai probabilitas 0,0000 ($< 0,05$), sehingga model yang digunakan adalah *FEM*.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	48.758036	3	0,0000

Sumber : Hasil olah data E-Views, 2024

Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara *REM* dan *FEM*. Jika nilai probabilitas > 0,05, digunakan *REM*, sedangkan jika < 0,05, digunakan *FEM*. Berdasarkan hasil olahan data, nilai probabilitas 0,000 (< 0,05) menunjukkan bahwa *FEM* adalah model terbaik untuk analisis ini.

Setelah melalui tahapan Uji Chow dan Uji Hausman, model terbaik yang dipilih adalah *FEM*. Berikut hasil estimasi *FEM* dari analisis regresi data panel:

Tabel 3. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	21.20986	2.247630	9.436542	0.0000
LOG_PDRB	0.095763	0.043136	2.220489	0.0276
LOG_PP	-0.190529	0.089288	-2.133865	0.0342
LOG_JP	0.628215	0.056690	11.08159	0.0000

Sumber : Hasil olah data E-Views,2024

Adapun persamaan model regresi data panel yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

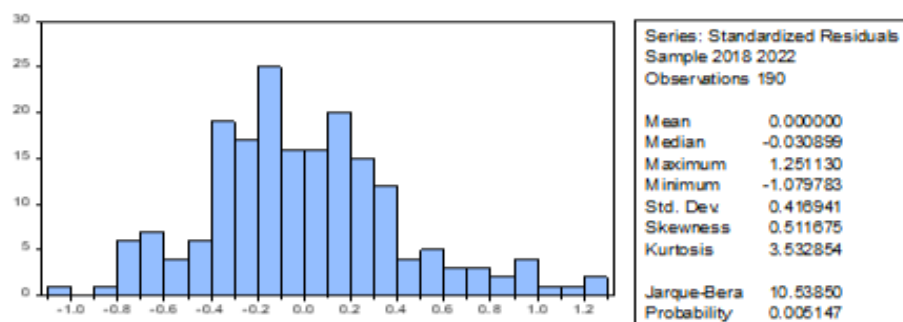
$$\log PAD = 21,20986 + 0,095783 \log PDRB - 0,190529 \log PP + 0,628215 \log JP$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; (1) Konstanta sebesar 21,209 berarti jika variabel independen (PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk) bernilai nol, maka PAD sebesar 21,209%. (2) Koefisien regresi PDRB sebesar 0,095 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDRB 1% akan meningkatkan PAD sebesar 0,095% dan begitu juga sebaliknya. (3) Koefisien regresi PP sebesar -0,190 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah 1% akan menurunkan PAD sebesar 0,190% dan begitu juga sebaliknya. (4) Koefisien regresi JP sebesar 0,628 menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk 1% akan meningkatkan PAD sebesar 0,628% dan begitu juga sebaliknya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui permasalahan dalam menganalisis data. Uji asumsi klasik yang dilakukan oleh Peneliti meliputi:

Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data E-Views, 2024

Gambar 5. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Metode Jarque-Bera digunakan, dengan kriteria keputusan: jika probabilitas $> 0,05$, maka residual berdistribusi normal, sedangkan jika probabilitas $\leq 0,05$, residual tidak berdistribusi normal (Damodar N, Gujarati dan dawn C, 2006). Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,055147, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

- Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	LOG_PDRB	LOG_PP	LOG_JP
LOG_PDRB	1.000000	0.367292	0.387796
LOG_PP	0.367292	1.000000	0.447831
LOG_JP	0.387796	0.447831	1.000000

Sumber : Hasil olah data E-Views, 2024

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antar variabel bebas dalam model regresi. Multikolinearitas terjadi jika koefisien korelasi antar variabel $> 0,80$. Berdasarkan hasil analisis, nilai koefisien korelasi antara PDRB dan Pengeluaran Pemerintah adalah 0,367, sedangkan antara PDRB dan Jumlah Penduduk adalah 0,388. Nilai ini berada di bawah 0,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas.

- Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	d.f.	t-Statistic	Prob.
C	0.967731	1.095351	0.883489	0,3781
LOG_PDRB	0.017089	0.021022	0.812930	0.4173
LOG_PP	-0.074771	0.043513	-1.718352	0.0874
LOG_JP	0.078655	0.027627	2.847011	0,0549

Sumber : Hasil olah data E-Views, 2024

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Kriteria keputusan adalah jika probabilitas $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika probabilitas $\leq 0,05$, terjadi heteroskedastisitas. Hasil analisis menunjukkan nilai probabilitas variabel PDRB sebesar 0,4173, Pengeluaran Pemerintah sebesar 0,0874, dan Jumlah Penduduk sebesar 0,0549, yang semuanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Statistik

Tahapan berikut setelah lolos uji asumsi klasik adalah uji statistik, yang meliputi uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Berikut hasil uji signifikansi parsial (uji t):

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	21.20986	2.247630	9.436542	0.0000
LOG_PDRB	0.095763	0.043136	2.220489	0.0276
LOG_PP	-0.190529	0.089288	-2.133865	0.0342
LOG_JP	0.628215	0.056690	11.08159	0.0000

Sumber : Hasil olah data E-Views, 2024

Uji Signifikansi Parsial (t-statistik) bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai probabilitas t-statistik untuk PDRB adalah 0,0276, pengeluaran pemerintah sebesar 0,0342, dan jumlah penduduk sebesar 0,0000. Semua nilai probabilitas ini berada di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. Adapun hasil uji F dan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Statistik	Nilai
R-squared	0.054945
Adjusted R-squared	0.039702
S.E of regression	0.257556
Sum squared resid	12.33833
Log likelihood	-9.838541
F-statistic	3.604615
Prob (F-statistic)	0.014497

Sumber : Hasil olah data E-Views, 2024

Sementara itu, uji signifikansi simultan (uji F atau F-statistik) dilakukan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000000, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

Kemudian, uji Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis, nilai R-squared yang diperoleh adalah 0,4770, seperti yang terlihat pada Tabel 7. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 47,7 persen variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk. Sisanya, sebesar 52,3 persen, dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Pembahasan

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan *fixed effect model*, variabel PDRB (X_1) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0276 ($< 0,05$), yang menandakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur pada

2018-2022. Hubungan PDRB dengan PAD bersifat positif, sehingga peningkatan PDRB akan mendorong kenaikan PAD. Analisis menunjukkan pola yang konsisten, seperti di Kabupaten Bangkalan, di mana PDRB meningkat dari Rp18.361.000.000 pada 2018 menjadi Rp18.551.000.000 pada 2019, yang diikuti kenaikan PAD dari Rp199.258.427.616 menjadi Rp262.258.214.631. Sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi regional, termasuk kontribusi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Temuan ini mendukung teori Rostow dan Harrod-Domar yang menyatakan bahwa peningkatan PDRB signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga sejalan dengan (Saldi et al., 2021) temuan di Kabupaten Kerinci yang menunjukkan pentingnya sektor strategis, seperti pertanian dan industri, dalam mendukung PAD. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam meningkatkan PDRB menjadi krusial untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur

Estimasi menggunakan *FEM* menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (X2) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur pada 2018-2022 (probabilitas $0,0342 < 0,05$). Peningkatan pengeluaran pemerintah cenderung menurunkan PAD, terutama karena alokasinya pada proyek jangka panjang, seperti infrastruktur, yang dampaknya belum dirasakan langsung. Contohnya, di Kabupaten Jember, proyek Asrama Haji dan Gedung Rawat Jalan RS Soebandi mangkrak, menyebabkan pemborosan anggaran tanpa hasil ekonomi nyata (Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur, 2021). Data kabupaten/kota lainnya, seperti Bangkalan dan Banyuwangi, menunjukkan pola serupa. Teori Wagner mendukung temuan ini, bahwa pengeluaran pemerintah yang tidak efisien dan tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dapat menekan penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan anggaran yang efisien untuk memaksimalkan PAD dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur

Estimasi menggunakan *FEM* menunjukkan bahwa jumlah penduduk (X3) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur pada 2018-2022 (probabilitas $0,000 < 0,05$). Peningkatan jumlah penduduk berkontribusi pada peningkatan PAD, sebagaimana terlihat pada data 38 kabupaten/kota. Misalnya, di Kabupaten Bangkalan, PAD meningkat dari Rp199,26 miliar pada 2018 menjadi Rp262,26 miliar pada 2019, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hasil ini mendukung teori Adam Smith, yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk berdampak positif terhadap pendapatan daerah jika penduduk berkontribusi melalui pajak dan pungutan lainnya. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Muid dan Pratomo (2015) di Kabupaten Gresik, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk meningkatkan penerimaan pajak, retribusi, dan pungutan lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola pertumbuhan penduduk secara strategis, terutama dalam penyediaan fasilitas yang mendukung produktivitas masyarakat, untuk mengoptimalkan kontribusi terhadap PAD.

a. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur

Estimasi menggunakan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa variabel independen PDRB (X1), pengeluaran pemerintah (X2), dan jumlah penduduk (X3) secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur pada 2018–2022, dengan nilai probabilitas (f-statistik) 0,000 ($<0,05$). Hasil uji koefisien determinasi (adjusted R^2) sebesar 0,477 mengindikasikan bahwa 47,7% variasi PAD dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sementara 52,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Secara khusus, PDRB memiliki kontribusi positif terhadap PAD melalui pertumbuhan ekonomi lokal. Pengeluaran pemerintah, terutama pada pembangunan infrastruktur, berperan sebagai katalisator untuk mendorong aktivitas ekonomi yang meningkatkan PAD. Sementara itu, jumlah penduduk juga menjadi indikator penting, karena peningkatan penduduk mendukung penerimaan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan studi Hernawati (2019) yang menunjukkan bahwa PDRB, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah disarankan untuk terus mengelola pengeluaran secara efektif dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel PDRB (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2), dan jumlah penduduk (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur tahun 2018–2022. PDRB memiliki pengaruh positif dengan probabilitas 0,0276 ($<0,05$), sementara pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh negatif dengan probabilitas 0,0342 ($<0,05$). Jumlah penduduk berpengaruh positif dengan probabilitas 0,0000 ($<0,05$). Secara simultan, ketiga variabel ini juga berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan probabilitas 0,000000 ($<0,05$) dan koefisien determinasi (adjusted R^2) sebesar 47,7%, menunjukkan bahwa 52,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan penambahan variabel independen lain dan pembaruan lokasi serta waktu penelitian untuk pengembangan studi di masa depan. Pemerintah diharapkan memanfaatkan temuan ini sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan strategis, seperti evaluasi anggaran untuk efisiensi pengeluaran dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kapasitas ekonomi, sehingga mampu mendorong PAD melalui peningkatan pembayaran pajak dan retribusi.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur. (2021). *Proyek Infrastruktur di Kabupaten Jember Mangkrak – Minta APH Mengusut Tuntas*. Diakses pada 7 Mei 2024.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. (2024). *Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2018-2022*. Diakses pada 7 Mei 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). *Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022*. Diakses pada 7 Mei 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022*. Diakses pada 7 Mei 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). *Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022*. Diakses pada 7 Mei 2024.

- Damodar N. G. dan Dawn C, P. (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Ernita, D. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.53363/buss.v1i1.23>
- Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Hastuti, D., Kadarisman, E., & Rohman, A. A. (2016). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan PDRB terhadap PAD Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 1240–1254.
- Hernawati. (2019). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Muid, A., & Pratomo, S. D. (2015). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Gresik Tahun 1994-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2).
- Oktiani, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 16–35.
- Perwira, R., Ridwan, & Fattah, V. (2018). Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan dan Jumlah Penduduk Produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabuapten/Kota di Sulawesi Tengah. *E Jurnal Katalogis. Universitas Tadulako*, 6(2), 1–15.
- Saldi, A., Zulgani, Z., & Nurhayani, N. (2021). Analisis Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 201–210. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16260>
- Wahyuni. (2021). Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.